

## Ma'ruf Abdullah: Terkait Full Day, Sekolah Diminta Siapkan Kantin dan SDM

Jum'at, 07-07-2017



Benturan jam belajar di madrasah diniyah (MD) dan banyak yang kalah bersaing jika pemerintah menerapkan full day school (FDS), dihembuskan kasus di Pasuruan. Ketika program wajib ikut MD berdasarkan peraturan daerah, ternyata berdampak mematikan MD itu sendiri. Hal ini dibantah Wakil Ketua PW. Muhammadiyah Kalimantan Selatan Prof. Dr. HM. Ma'ruf Abdullah, SH, MM, yang menyebut program FDS di sekolah akan mematikan madrasah diniyah.

Menurut pendapat saya, buka mematikan, malah akan menyuburkan madrasah diniyah. Karena kegiatan ekstrakurikuler nya bisa dikerjasamakan dengan kegiatan diniyah. Hal itu sudah digodok oleh Mendikbud dan Kemenag, panduannya sudah digodok. Orang sementara ini belum banyak yang mempelajari, sehingga lebih dulu takut," katanya. Dia menyebutkan, program sekolah lima hari ini sangat bagus. Hanya orang yang dibayangi oleh ketidaktahuan, dan terlalu apriori. Terbarunya, penerapan FDS itu kini tinggal menunggu turunnya peraturan presiden agar payung hukumnya lebih kuat. "Dan sekolah yang merasa belum siap maka dibolehkan tidak wajib mengikuti, silakan melengkapi dulu, baru jika sudah siap maka itu akan ikut menerapkan. Jadi, yang siap dulu," kata dia.

Sekolah di bawah organisasi Muhammadiyah, dikatakan Ma'ruf Abdullah, sudah siap hal tersebut. Jangan apriori begitu. Kan bisa dikerjasamakan pelajaran agamanya, yang terdekat SD nya bisa bergabung dengan diniyah. Ini sama sekali tidak mengucilkan diniyah. Malah nantinya akan lebih menyuburkan diniyah yang ada, ujarnya. "Kalau di Muhammadiyah sendiri, wacana sekolah lima hari itu sudah lama, terutama di Jawa, itu sudah biasa dilaksanakan di atas pukul 14.00 wita. Istilah Ismuba, yakni Keislaman dan bahasa Arab dan juga namanya Islamic Integral School. Jadi sekolahnya terintegrasi dengan pendidikan agama," urai Ma'ruf Abdullah.

Menurut dia yang menolah program itu karena faktor apriori saja dan belum memahami betul soal rencana pelaksanaan ini. Padahal dua kementerian ini sudah mengatur, tidak akan ada benturan dan

tidak juga dipaksakan, diminta sekolah menunggu sampai siap. Termasuk kalau ruang kelas yang punya pondok pesantren kurang, juga tidak disarankan jika itu diwajibkan. Kalau belum memenuhi prasarannya tidak diwajibkan, kalau ngajinya di surau maka itu bisa diintegrasikan dengan yang terdekat dengan diniyahnya," kata dia.

Karena ini baru, imbuhnya, anak di kalangan diniyah masih sedikit ketakutan. Namun, lambat laun akan menyadari sisi positifnya. "Yang jadi persoalan, mungkin semisal kantin di sekolah. Karena kemungkinan besar setelah penerapan full day school tersebut, mengarahkan siswa untuk makan di kantin. Nah sejenis kantin itu bisa disiapkan sekolah masing-masing. Kalau masih belum mampu, ya jangan dipaksakan," kata dia.

Dari kegiatan FDS ini, juga tentu akan menambah biaya operasional , semisal listrik, PDAM dan SDM guru. "Biaya operasional tentu juga harus dipertimbangkan termasuk kegiatan SDM guru-guru. Karena tidak dipaksakan sebelum siap," kata dia.

Disebutkan dia, sisi positifnya jelas banyak, yakni penggunaan waktu kepada anak lebih terarah, anak tidak akan lagi dibebani PR. Ketika Sabtu Ahad akan penuh dengan keluarga dan karakter anak akan terbentuk.

"Ini penyelenggaraan sekolah meniru yang terbaik di dunia yakni sekolah di Finlandia. Kurikulumnya tidak berganti-ganti seperti di Indonesia, dan akan berkumpul ketika Sabtu Ahad dengan keluarga," katanya. Harapannya, penerapan ini bisa membangun manusia yang berkarakter, guru-guru dan SDM pun harus siap. "Yang jelas hemat saya, tidak akan ada yang dirugikan karena sudah dibicarakan dengan dua kementerian terkait. Karena pemerintah tidak ingin ada yang dirugikan," kata Ma'ruf Abdullah. (lis)